

HASIL TINJAUAN ATAS DOKUMEN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SUMBA TIMUR  
TAHUN 2022-2026

# TINJAUAN

RANCANGAN RPJMD  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
TAHUN 2022-2026

Oleh : Ferdinandus Rondong, S.IP, M.Si.

Meiske M.N. Sihombing, S.E., M.E.

**TINJAUAN RANCANGAN RPJMD**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021-2026**

**I. BAB I**

1.1. Daftar Isi : menambahkan 1.4. Maksud dan Tujuan dan 1.5. Sistematika Penulisan. Pada bagian isi, sudah ada namun belum dimasukkan dalam daftar isi.

1.2. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya :

a. Perbaikan visualisasi hubungan antar dokumen perencanaan disajikan dalam bentuk tabel sehingga perbandingannya lebih nyata wujudnya (dalam bentuk teks). Contoh diambil dari RPJMD Provinsi Jawa Timur.

| NO | Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024                                      | RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024   |
|----|--|---|
|    | ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN  | KESESUAIAN DENGAN MISI DAN TUJUAN   |
| 1  | Penurunan ketimpangan antar wilayah melalui pengentasan kemiskinan, penyelesaian | Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan |

b. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Sumba Timur dengan beberapa dokumen perencanaan baik nasional maupun daerah (RPJP Nasional, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi dan Kabupaten, KLHS Kabupaten), tidak selalu hanya keterkaitan antar visi/misi. Supaya lebih dapat dipahami bisa dikaitkan dengan misi maupun tujuan dari dokumen-dokumen perencanaan-perencanaan tersebut. Contoh diambil dari RPJMD Provinsi Jawa Timur

| NO | Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024  | RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024   |
|----|--|---|
|    | ketimpangan pendapatan dan konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa.  | Keterhubungan Wilayah.  |
| 2  | Penguatan Pusat pertumbuhan Wilayah, melalui pusat pertumbuhan baru, konektivitas dan optimalisasi Kawasan strategis.  | Tujuan 1 pada Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah.  |
| 3  | Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, melalui penguatan akses pelayanan dasar, optimalisasi pendapatan daerah non APBD dan peraturan daerah yang mendukung inovasi. | Misi 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris dan Demokratis. Memperkuat Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.  |
| 4  | Pengelolaan Urbanisasi, agar tidak menjadi permasalahan di perkotaan dan dapat menyumbang peningkatan ekonomi.   | Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.<br>Tujuan 1 Misi 2 : menurunnya Angka Kemiskinan |

- c. Keterkaitan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Sumba Timur dan RTRW Provinsi NTT perlu dijelaskan lebih detail dan ditunjukkan dalam bentuk tabel. Contoh diambil dari RPJMD Provinsi Jawa Timur.

**Keselarasn Dokumen RPJMD Dengan KLHS RPJMD**

| No. | Isu Strategis KLHS RPJMD Provinsi Timur Tahun 2019 - 2024                  | RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024  |
|-----|--|--|
| 1   | Kualitas Lingkungan Permukiman, Kesehatan dan Sanitasi                     | Sesuai Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. |
| 2   | Sumber Daya Air dan Kekeringan   |  |
| 3   | Konflik Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Hutan                              | Tujuan 1 Misi 4 : Terwujudnya Pembangunan berwawasan Lingkungan.   |
| 4   | Kemiskinan dan Permasalahan Sosial (Pendidikan, hukum, dan konflik sosial) | Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.   |

- d. Keterkaitan dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Timur dengan KLHS belum dijelaskan. Perlu dimasukkan karena sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam permendagri 89/2017 (psl 47 ay. 3 huruf g)

## II. BAB II Gambaran umum

- 2.1. Kami menemukan potensi dan ancaman sudah ada di dalam sub bab pada Bab II, namun untuk memudahkan pembaca menangkap dengan jelas tentang potensi dan ancaman, maka sebaiknya perlu ada pembahasan khusus tentang potensi dan ancaman dalam pengembangan wilayah. Potensi dan ancaman tersebut dapat diuraikan per sektor seperti: Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan lain-lain.
- 2.2. Perlu digambarkan secara umum tentang kerja sama daerah, sehingga memudahkan pembaca memahami kondisi daerah terkait kerja sama tersebut. Selain itu dapat memudahkan tim menyusun secara detil pada bagian isu strategis pada Bab V.

- 2.3. Halaman 23 : Bagaimanakah gambaran umum kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kab Sumba Timur ? Hal ini terkait dengan potensi demografi di masa datang dan sebaran penduduk guna penentuan target kebijakan pemerintah daerah.
- 2.4. Halaman 22-24 : Disarankan selain menggunakan data jumlah penduduk nominal, diberikan juga dalam bentuk persentase agar lebih mudah dibaca dan dicerna secara lebih cepat. Dan dalam visualisasinya menggunakan grafik (balok, donat dll).
- 2.5. Halaman 23-24, Penyajian data lebih mudah dibaca dengan menggunakan data nominal dan persentase misalnya data demografi Tabel 2.10; 2.11. Dan menggunakan grafik (balok, donat dll).
- 2.6. Halaman 25 dan seterusnya: perlu pengaturan kembali yaitu :
- a. Judul sub-sub bab PDRB diganti menjadi Struktur Ekonomi (hlmn 25) sesuai dengan isinya yang menguraikan gambaran struktur ekonomi (komposisi ekonomi). Dan dianalisa dengan melihat apakah ada pergeseran sektor selama 5 tahun tersebut. Jika ada, dijelaskan penyebabnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD yang lalu atau kajian pendahuluan. Karena jika diketahui penyebab meningkat atau menurunnya peranan sektor ekonomi akan membantu dalam penentuan prioritas pembangunan (program/kegiatan).
  - b. Pada halaman 25 akhir : *“Pada tahun 2020, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan kontribusi yang cukup besar pada PDRB Kabupaten Sumba Timur walaupun kontribusinya setiap tahun cenderung mengalami penurunan”* Dari data, penurunan peranan sektor pertanian berlangsung hingga tahun 2018, lalu mulai meningkat pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Bisa dijelaskan penyebab perubahan tersebut dan ini bisa jadi penguatan terhadap isu strategis serta potensi pengembangan wilayah selanjutnya. Bisa didukung juga dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tersebut. Bisa saja pertumbuhan sektor pertanian lebih lambat atau lebih cepat dibanding sektor lain dan apa yang menjadi penyebabnya.
  - c. Sub bab berikut yaitu PDRB dan struktur ekonomi (halaman 26) disarankan judulnya diganti menjadi Pertumbuhan Ekonomi karena lebih sesuai dengan isinya tentang pertumbuhan ekonomi Kab Sumba Timur. Disarankan ditampilkan juga pertumbuhan

ekonomi Provinsi NTT dan Nasional sebagai pembanding dan memberikan gambaran perekonomian Kab. Sumba Timur di level provinsi dan Nasional. Agar menjadi pengantar yang baik untuk analisa LQ berikutnya. Baik ADHB dan ADHK.

- d. Analisa pertumbuhan ekonomi di halaman 28 dipindahkan/disatukan ke halaman 26. Pergerakan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (ADHK 2010), dapat dianalisa dengan dukungan analisa kondisi inflasi daerah (halaman 28) dan penggunaan PDRB (halaman 26 akhir-27 awal : Tabel 2.15). Dalam analisisnya kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi disandingkan dengan analisa kondisi inflasi daerah dan komponen pengeluaran. Misalnya : Pertumbuhan terbesar pada sektor apa saja dan pertumbuhan menurun pada sektor apa saja. Dan apa yang menjadi penyebabnya serta upaya pemerintah pada masa itu. Untuk memperkaya analisa, jika terjadi penurunan, bisa dianalisa PDRB menurut pengeluaran. Penurunan terbesar terjadi pada komponen pengeluaran yang mana ? Apakah pada konsumsi Rumah tangga? Atau PMTB ? Dan pengaruh pandemi Covid-19 dapat tergambar jelas (disandingkan juga dengan data perkembangan Covid-19 tahun 2020).
- 2.7. Setelah itu barulah masuk ke bagian Pendapatan perkapita dan ketimpangan (halaman 27) lalu dilanjutkan dengan pengeluaran konsumsi masyarakat dan tingkat kemiskinan (halaman 28).
- 2.8. Penjelasan tentang laju inflasi perlu digambarkan komponen pengeluaran mana yang mendominasi pergerakan laju inflasi. Dan perlu diperhadapkan dengan kondisi inflasi di NTT dan nasional. Sehingga memudahkan tim dalam perumusan isu strategis dan penentuan target.
- 2.9. Halaman 109 : Perlu ditambahkan perkembangan penanaman modal per sektor, baik dalam nilai rupiah dan pertumbuhannya. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam peningkatan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dalam analisa komposisi (struktur ekonomi) terlihat bahwa peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mendominasi perekonomian namun peranan tersebut menurun dibanding sektor lainnya. Di sisi lain, potensi pengembangan cukup besar jika dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya (input) dalam sektor pertanian. Apabila diketahui penyebab penurunan peranan sektor pertanian

terhadap ekonomi, diperhadapkan juga dengan perkembangan investasi pada sektor pertanian, maka akan terlihat isu strategis pembangunan serta kebijakan yang akan diambil.

### **III. BAB III Gambaran Keuangan Daerah**

- 3.1. Hanya sebagai catatan : Ukuran pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian daerah merupakan salah satu dari sekian faktor yang dapat mengindikasikan produktifitas pemerintah dalam mengelola sumber daya. Makin besarnya ukuran pemerintah tersebut belum tentu menunjukkan produktifitas pemerintah apalagi jika pertumbuhan ekonominya menurun. Besar kecilnya ukuran belanja pemerintah dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi tidaklah menjadi harga mati. Namun yang menjadi perhatian adalah produktifitas pemerintah sebaiknya makin baik dalam mengelola seluruh sumber daya (meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah). Ukuran belanja pemerintah di masa lalu rata-rata 20% dengan rata-rata pertumbuhan 3.94% per tahun. Pada periode 2022-2026, berdasarkan target APBD, rata-rata ukuran pemerintah adalah 23% per tahun dengan target pertumbuhan rata-rata 4.19 % - 4.99%.
- 3.2. Proyeksi APBD pada halaman 146 Tabel 3.11. Peningkatan PAD pada tahun 2021 ke tahun 2022 dalam proyeksi bertumbuh sekitar 35 %. Sisanya bertumbuh sekitar 5 % per tahun. Peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2022 sebaiknya disertakan juga dengan asumsi pengelolaan komponen PAD pada tahun 2022. Dan didukung oleh rancangan strategi yang signifikan dalam masa pemulihan ekonomi dalam masa pandemi khususnya strategi ekstensifikasi dan intensifikasi yang masif. Selain mempertimbangkan kondisi daerah, dapat juga mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional dan wilayah Provinsi NTT dan potensi pemulihan ekonomi dengan catatan pandemi Covid-19 dapat dikendalikan. Dari pengalaman masa lalu tahun 2016-2020, rata-rata pertumbuhan Pajak daerah sekalipun positif 11 %, namun jika dilihat tahun 2020, justru menurun drastis lebih dari 50 % dalam 1 tahun akibat pandemi Covid-19. Dana perimbangan yang merupakan komponen terbesar APBD mengalami penurunan rata-rata 2 %. Dan pada periode 2019-2020 menurun hampir 15%, karena menurunnya perekonomian nasional akibat pandemi.

#### **IV. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis**

- 4.1. Halaman 152, pada bagian permasalahan, belum terlihat permasalahan dalam pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19.
- 4.2. Pada bagian Isu strategis KLHS (halaman 175) dikaitkan dengan Bab II
- 4.3. Halaman 175, disebutkan kerja sama sebagai bahan pertimbangan, namun belum ada gambaran kerja sama yang sudah dilaksanakan selama ini pada Bab II.
- 4.4. Halaman 206 : perlu memasukkan penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap pembangunan daerah. Hal ini penting karena sangat mempengaruhi target dalam kinerja pemerintahan ke depan.

#### **V. BAB V Halaman 211 dan BAB VIII halaman 318 dan halaman 324**

- 5.1. Dalam tabel halaman 211 dan 318 disebutkan target pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun (2022-2026) dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 4,16% - 4.99% per tahun. Karena tidak tersedia penjelasan tentang penentuan target pertumbuhan ekonomi, maka perlu mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi di masa lalu. Jika diperhadapkan dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi Sumba Timur selama 5 tahun, termasuk masa pandemi, yaitu tahun 2016-2020, maka rata-rata pertumbuhannya berada pada 3.94 % per tahun. Jika tanpa pandemi, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5.14 %. Selain mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Sumba Timur di masa lalu perlu juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT (revisi target pertumbuhan ekonomi setelah pandemi).
- 5.2. Dalam tabel halaman 324, disebutkan target penanaman modal baik dalam negeri maupun asing, dengan rata-rata pertumbuhannya 2.84% per tahun. Sekali lagi karena tidak tersedia penjelasan mengenai penentuan target investasi daerah, maka penentuan investasi (PMA & PMDN) perlu mempertimbangkan beberapa hal :
  - a. Perlu adanya penjelasan mengenai perkembangan PMA dan PMDN periode sebelumnya baik nilainya maupun sektornya (pada Bab II. 2.4.3. hlmn 109). Karena apabila perkembangan investasi diketahui maka dapat diketahui efisiensi investasi daerah sebelumnya berdasarkan tenggat waktu investasi di setiap kelompok sektor

- ekonomi. Dan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja sebelumnya, bersama dengan diketahuinya efisiensi investasi daerah dapat membantu dalam penentuan target investasi periode berikutnya dan dapat membantu dalam penentuan isu/strategi pembangunan.
- b. Perkembangan investasi di periode sebelumnya diperhadapkan dengan target perkembangan investasi ke depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tertentu : **Apabila menggunakan PMTB** untuk menjelaskan investasi daerah, maka untuk mencapai rata-rata target pertumbuhan ekonomi 4.16 % (poin 1 di atas), maka perlu mempertimbangkan pertumbuhan investasi dan efisiensinya pada periode 2016-2020. Pada periode masa lalu, rata-rata pertumbuhan investasi daerah (PMTB) adalah 5.34 % per tahun dengan rata-rata efisiensinya diperkirakan 1.36 % per tahun. Artinya rata-rata penambahan investasi sebesar 5.34% menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3.94% per tahun. Pada periode yang akan datang (2022-2026), untuk mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi 4.16-4.99 % per tahun, dengan **asumsi efisiensi investasi terhadap pertumbuhan ekonominya sama dengan periode sebelumnya**, maka target kebutuhan pertumbuhan investasi adalah 5.64-6.76 % per tahun. Sedangkan target penanaman modal (investasi) dalam tabel di hlmn 324, rata-rata bertumbuh hanya 2.84% per tahun.
- c. Untuk mengatasi hal tersebut (poin b), disarankan perlu adanya penjelasan mengenai perkembangan penanaman modal di Sumba Timur (poin a). Analisa perkembangan investasi di masa lalu dan tahun berjalan (masa pandemi) akan memberikan informasi mengenai potensi pengembangan investasi dan sekaligus permasalahan yang menjadi penghambat investasi. Dengan demikian selain dukungan data kuantitatif, dapat juga diperoleh informasi yang tepat dalam penentuan target investasi periode ke depan dan strategi-strategi yang lebih tepat, fokus dan jelas.